

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terkait penelitian peta penawaran dan permintaan sukuk daerah propinsi dapat diambil kesimpulan hal – hal sebagai berikut :

2. Dari sisi penawaran sukuk berdasarkan analisis kinerja Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan analisis elastisitas, analisis *growth* dan analisis *share* didapatkan bahwa lima daerah propinsi yang memiliki angka indeks terbesar adalah Maluku, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan dan DI Yogyakarta;
3. Sedangkan dengan analisis batasan meminjam daerah propinsi merujuk PP 54 Tahun 2005 dengan data tahun 2005 – 2006 menunjukkan bahwa semua propinsi masih diperbolehkan melakukan peminjaman karena tingkat DSCR sebagai ukuran untuk menilai tingkat kemampuan daerah dalam melakukan pembayaran pengembalian atas pinjaman yang akan dilakukan. Dari semua propinsi yang dilakukan analisis pada masa tahun dimaksud semua propinsi memiliki DSCR lebih besar dari 2,5 sebagaimana dipersyaratkan oleh PP dimaksud. Daerah yang memiliki DSCR cukup kecil yaitu Sumatera Barat, Papua dan Jawa Barat, sedangkan tiga daerah yang memiliki DSCR paling tinggi adalah Propinsi Riau, Kalimantan Timur dan Nangroe Aceh Darussalam;
4. Berdasarkan batasan maksimal besaran pinjaman yang dapat dilakukan oleh pemerintah propinsi merujuk ketentuan PP No. 54 Tahun 2005 dan berdasarkan data tahun 2005 – 2006, lima propinsi yang memiliki kemampuan besar adalah Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat;
5. Peta penawaran daerah berdasarkan hasil pengolahan dengan menggunakan parameter kinerja PAD daerah dengan analisis elastisitas, *growth*, *share* dan digabungkan dengan kemampuan meminjam daerah merujuk ketentuan pada PP No. 54 Tahun 2005 didapatkan sepuluh daerah yang memiliki tingkat penawaran

untuk menerbitkan sukuk propinsi secara berurutan adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Maluku, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Banten, Sulawesi Tengah, Jambi, Jawa Timur dan Sumatera Utara;

6. Dari sisi permintaan dengan menggunakan parameter dana likuid lima besar propinsi yang memiliki tingkat permintaan yang tinggi yaitu DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Jawa Barat dan DI Yogya. Propinsi – propinsi dimaksud masing masing memiliki potensi permintaan sukuk daerah lebih dari satu triliun;
7. Peta permintaan sukuk daerah dengan menggunakan parameter jumlah penduduk muslim, tingkat keluarga sejahtera dan penghimpunan dana likuid didapat enam besar propinsi yang memiliki tingkat permintaan tinggi yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, DI Yogya, Jawa Tengah dan Sumatera Utara;
8. Berdasarkan peta penawaran dan permintaan tersebut dapat diperhitungkan dengan analisis kuadran dan indeks didapatkan tujuh propinsi yang memiliki indeks penawaran dan permintaan yang tinggi yaitu Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Timur, DI Yogya, Sumatera Barat dan Jambi.

## 5.2 Saran – saran

Selanjutnya sebagai tindak lanjut atas hasil penelitian ini kiranya dapat diajukan saran – saran sebagai berikut :

1. Terhadap daerah – daerah yang memiliki tingkat permintaan sukuk cukup tinggi khususnya terhadap daerah yang memiliki dana likuid di perbankan cukup tinggi kiranya perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut agar dana – dana dimaksud di masa mendatang dapat dimobilisir untuk membiayai keperluan pendanaan proyek – proyek daerah.
2. Terhadap daerah – daerah yang memiliki tingkat penawaran tinggi terutama yang memiliki batasan meminjamnya cukup tinggi kiranya perlu melakukan berbagai inventarisir proyek – proyek yang dimasa mendatang kemungkinan dapat dibiayai dari instrumen sukuk.

3. Untuk ketujuh propinsi yaitu Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogya, Sumatera Barat dan Jambi perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk semakin menguatkan kemungkinan penerbitan sukuk oleh pemerintah propinsi sebagai instrumen pembiayaan proyek – proyek daerah.

